

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,
AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN SISTEM
PELAPORAN TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL**

(Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)

Oleh :

Rona Efrizar

Pembimbing : Hardi dan Meilda Wiguna

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : ronadroid@gmail.com

*Clarity of Budget Objective, Public Accountability, Systems Reporting and
Managerial Performance*

(Study empiris in SKPD Kabupaten Rokan Hulu)

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Budget Targets Clarity Managerial Performance, Public Accountability on Managerial Performance and Reporting System on Managerial Performance. This study was a quantitative research. The sample is determined by using purposive sampling and sampling for each SKPD using the proportional method. The sample in this study was 81. Data were analyzed using multiple regression with SPSS version 20. The results showed that the Budget Targets Clarity positive effect on Managerial Performance, Public Accountability positive effect on Managerial Performance and Reporting System positive effect on Managerial Performance. The results of this study indicate that the first, related to the Budget Goal Clarity Managerial Performance with t count $3,177 > 1,991$ and $0,002$ significant < 0.05 . Second, the Public Accountability for Managerial Performance with t count $3.585 > 1.991$ and 0.001 significant < 0.05 . Third, the Reporting System for Managerial Performance with t count $2,547 > 1,991$ and $0,013$ significant < 0.05 . Determination coefficient (Adj-R²) This means that 56.8%. And then 43.2% had an impact by other variables

Keywords : managerial performance, clarity of budget objective, public accountability, and systems reporting

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional didasari pada prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini mengacu pada meningkatnya keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan anggaran daerah tersebut. Mulai dari kepala daerah

hingga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawahnya. Ini dapat diartikan sebagai meningkatnya partisipasi pegawai dari tingkatan bawah dalam proses penyusunan anggaran. (Setyowati dan Purwantoro, 2013)

Adapun untuk daerah Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan esensi prinsip pemekaran daerah dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 seperti kewilayahan, kemampuan, pelayanan dan percepatan pembangunan dua daerah otonomi baru yang akan dimekarkan itu telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, hal itu terungkap, dalam ekpose hasil kajian akademik dari tim independen pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Rohul di hadapan Pemerintah Kabupaten Rohul, Rabu (1/4) siang di ruang rapat lantai 3 (tiga) kantor bupati. Ekpose hasil kajian akademik yang dilakukan tim independen tersebut, merupakan yang ketiga kalinya yang dilakukan tim sejak Januari 2015 lalu.

Tim independen yang diketuai Dr Hasanudin menyebutkan, dari hasil kajian akademik oleh 9 orang tim independen, rencana pemekaran Kabupaten Rohul menjadi dua otonomi daerah baru secara akademik sudah layak dilakukan. Sementara itu, meski dinilai telah layak pemekaran Kabupaten Rokan Hulu menjadi dua daerah otonomi baru selain kabupaten induk oleh dari kajian akademik, Bupati Rohul Drs H Achmad MSi menyarankan adanya penajaman dalam kajian akademik ini, salah satu penajaman yang dimaksud seperti prospektif dari sisi perkembangan daerah, potensi dan juga dukungan pemerintah daerah

dalam rencana pemekaran daerah tersebut.

Ditambahkannya, setelah selesai kajian akademik usulan pemekaran Kabupaten Rokan Hulu menjadi dua daerah otonomi baru dan 1 kabupaten induk ini, pemerintah daerah akan melanjutkan tahapan selanjutnya, pengusulan Ranperda Pemekaran Kabupaten Rohul itu ke DPRD Rohul yang direncanakan pada bulan ini. Setelah disetujui DPRD Rohul, usulan pemekaran Kabupaten Rokan Samo dan Kota Baharu Pasir pengaraian akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Provinsi Riau, dalam hal ini persetujuan dari Gubernur Riau dan DPRD Riau. Jika usulan ini disetujui oleh Gubernur Riau, akan diteruskan ke Kemendagri RI, namun sampai saat ini belum terealisasi. (riaupos.co, 2015)

Di segi yang berbeda Pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dituntut mempunyai kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas dengan adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut dalam mengkoordinasi Aparatur pemerintah daerah seperti Sekretariat Daerah, SKPD dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat untuk lebih berorientasi pada kepentingan publik, pemerintah harus berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas kepada masyarakat yang berkesinambungan.

Namun yang terjadi saat ini khususnya di Kabupaten Rokan Hulu banyak program di satuan kerja yang terpaksa di hapuskan yang berdampak kepada kinerja manajerial, karena hasil wawancara dengan

beberapa responden yang bekerja di suatu instansi pemerintahan Kab Rokan Hulu mengatakan bahwasanya kinerja pada tahun 2016 sangat tidak sesuai rencana karna terkendalanya akibat defisit anggaran yang berimbas kepada partisipasi manajerial untuk menjalankan program dan mengelola seluruh satuan kerjanya. Sebagian pihak mengatakan penyebab defisit ini dikarenakan turunnya harga minyak dunia sehingga berdampak pada Dana Bagi Hasil (DBH) Rokan Hulu yang turun hingga 50%. (riaupos.co, 2015)

Tapi ini bukan penyebab satu-satunya terjadinya defisit anggaran tersebut apabila dilihat dari faktor-faktor penyebabnya, beberapa faktor tersebut adalah:

1. Anggaran Belanja daerah terlalu besar
2. Sistem penganggaran yang belum efisien
3. Tidak terintegrasi antara RAPBD dengan RPJMD
4. Tidak adanya skala prioritas pembangunan dalam penusunan anggaran

Hal ini diperkuat lagi oleh hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Riau dalam pemeriksaan ini badan pemeriksa keuangan Republik Indonesia memberikan opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas atas laporan keuangan pemerintah kabupaten rokan hulu anggaran 2014.

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Pengendalian atas Pengelolaan Kas Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Belum Memadai dan (2) Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Belum

Memadai. BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, diantaranya yaitu: (1) Terdapat Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2014 Yang Terlambat Disetorkan dan Belum Disetorkan ke Kas Daerah/Negara dan (2) Kelebihan Pembayaran atas Empat Paket Kegiatan pada Dinas Pertambangan dan Energi. (BPK, 2015).

Berdasarkan kondisi yang telah di terangkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial Pada Kabupaten Rokan Hulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Apakah ada pengaruh kejelasan anggaran terhadap kinerja manajerial? 2) Apakah ada pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial? 3) Apakah ada pengaruh ketepatan sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial?

Adapun tujuan yang ingin di-capai dalam hal ini adalah untuk mengetahui : 1) Membuktikan adanya pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. 2) Membuktikan adanya pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial. 3) Membuktikan adanya pengaruh ketepatan sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial.

TELAAH PUSTAKA

Kinerja Manajerial

Pengertian kinerja dalam Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang tertuang dalam Impres No. 7 tahun 1999

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program atau kebijaksanaan sesuai sasaran dan tujuan yang ditetapkan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi, kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu atau kinerja organisasi. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu (Setyowati dan Purwantoro, 2013).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan anggaran yang ingin dicapai organisasi, hal ini berimplikasi pada penurunan senjangan anggaran, anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, penganggaran sektor publik berkaitan dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan (Mardiasmo, 2005).

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dalam arti sempit dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa organisasi (atau pekerja individu) bertanggung jawab dan untuk apa organisasi (pekerja individu)

bertanggung jawab. Dalam pengertian luas akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Putra, 2013).

Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Yulianti,dkk ,2014).

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial .

Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi antar bagian yang mendorong adanya komunikasi dan kesatuan tindakan. Anggaran juga didefinisikan sebagai suatu rencana tindakan (*plan of action*) yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi perusahaan pada masa mendatang dalam hubungannya dengan pendapatan, arus kas, posisi keuangan dan rencana-rencana lainnya yang relevan dengan hal-hal tersebut (Putra, 2013). Anggaran yang baik

tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan umum lebih dari itu anggaran harus memberikan informasi mengenai kondisi kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah, dalam hal ini kejelasan sasaran anggaran akan mendorong manajer lebih efektif untuk melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran yang tidak jelas. (Sari, dkk 2014). Dari uraian diatas hipotesis yang dilakukan adalah :

H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Solina, 2014). Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja

lembaga sektor publik. (Solina, 2014).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Putra, 2013). Dari uraian diatas hipotesis yang dilakukan adalah :

H₂ : Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial

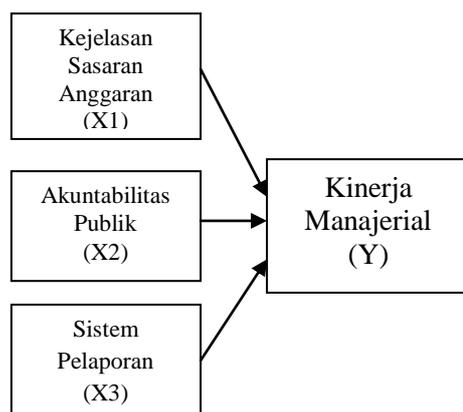
Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Kusumaningrum, 2010). Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan (Setiawan, 2014).

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran, sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan (Setiawan, 2013). Dari uraian diatas hipotesis yang dilakukan adalah :

H₃ : Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial.

Model Penelitian

Gambar1
Model Penelitian



Sumber : Data Olahan, 2016

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pegawai dan karyawan (SKPD) di Kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 27 SKPD. Teknik yang digunakan dalam pengambilan

sampel yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2007:123).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang digunakan adalah data primer yaitu informasi yang diperoleh langsung dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu melalui penyebaran pertanyaan dalam bentuk kuisisioner pada seluruh SKPD Kabupaten Rokan Hulu.

Metode penelitian yang digunakan yaitu : 1) Penelitian Lapangan, Yaitu pengumpulan data primer dengan cara memberikan surat yang berisikan pertanyaan kepada instansi terkait dengan meninjau secara langsung. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang akan diberikan kepada responden yaitu pejabat dan pegawai yang bekerja pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yaitu : Pimpinan, Kasubag Keuangan Dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan. 2) Penelitian Kepustakaan, Penelitian ini sangat berguna untuk mendukung landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Data-data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, pencarian di internet dan instansi terkait serta referensi lainnya yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Kinerja Manajerial (Y)

Adapun yang dimaksud dengan kinerja manajerial adalah

kinerja dari individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan atau presentasi. Salah satu hal yang berkaitan erat dengan kinerja manajerial adalah partisipasi manajer dalam proses penyusunan anggaran (Supriyatno, 2010)

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert, dengan indikator yang diadopsi dari Solina (2014). Penilaian tersebut diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Ragu-Ragu, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

Kejelasan sasaran anggaran didefinisikan sebagai gambaran keluasan anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik serta dimengerti oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaiannya. Apabila regulasi nya tidak jelas maka Pelaksana anggaran akan menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja jika terdapat ketidakjelasan sasaran anggaran sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Yulianti dkk, 2014)

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert, dengan indikator yang diadopsi dari Putra (2013). Penilaian tersebut diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Akuntabilitas Publik (X2)

Akuntabilitas publik merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada publik

atas kinerja yang telah dilakukan. Terdapat empat unsur akuntabilitas publik yang harus dipenuhi, diantaranya adalah akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas program, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Putra, 2013).

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert, dengan indikator yang diadopsi dari Solina (2014). Penilaian tersebut diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

Sistem Pelaporan (X3)

Sistem pelaporan adalah laporan yang menggambarkan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi variansi yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif. (Hidayattullah dan Irine Herdjiono, 2015).

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert, dengan indikator yang diadopsi dari Hidayattullah (2015). Penilaian tersebut diukur dengan model skala likert lima poin, yaitu (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, dan (5) Sangat Setuju.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pejabat dan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu. Penyebaran kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan secara langsung kepada pejabat dan pegawai yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu.

Kuesioner tersebut disebarikan pada 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Rokan Hulu secara langsung. Dari 81 kuesioner yang disebarikan, kuesioner yang kembali sebanyak 81 kuesioner (100 %). Kuesioner yang tidak mendapatkan respon sebanyak 0 kuesioner (0 %). Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 81 kuesioner (100 %).

Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Sistem Pelaporan dan Kinerja Manajerial disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang menunjukkan angka minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kejelasan Sasaran Anggaran	81	7.00	20.00	12.9753	3.43138
Akuntabilitas Publik	81	9.00	22.00	15.5556	3.70135
Sistem Pelaporan	81	10.00	26.00	16.7654	3.30633

Kinerja Manajerial	81	8.00	19.00	13.9506	3.22452
Valid N (listwise)	81				

Sumber : Data Olahan, 2016.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). Pengujian validitas ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel untuk degree of freedom ($df = n - 2$) dengan $\alpha = 0,05$, dalam hal ini *n* adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df = n - 2$ ($81 - 2$) = 79, sehingga didapat *r* tabel untuk df (79) = 0,219.

Uji Reliabilitas

Untuk mengukur reliabilitas dilakukan dengan uji *statistic Cronbach Alpha* (α). Semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka semakin baik. Secara umum, keandalan kurang dari 0,6 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,8 adalah baik (Sekaran, 2006:182). Jadi, apabila suatu variable menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$ maka variabel tersebut reliabel.

Hasil uji reabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Hasil Uji Realibilitas Data

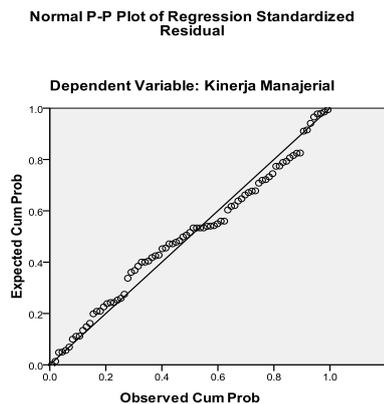
NO	Instrument Variabel Penelitian	Nilai Cronbach's Alpha
1	Kinerja Manajerial(Y)	0,815
2	Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	0,813
3	Akuntabilitas Publik(X ₂)	0,913
4	Sistem Pelaporan (X ₃)	0,806

Sumber : Data Olahan, 2016.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Hasil Uji Normalitas Data

Dengan menggunakan normal *P-P Plot* data yang ditunjukkan menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas (santoso, 2004:34). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar bawah ini.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2016.

Pada grafik normal *P-P Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena asumsi normalitas (Ghozali 2013:163).

Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Jika $VIF > 10$ dan nilai *Tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2013:106).

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas Data

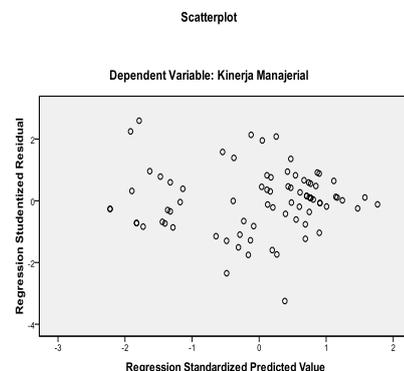
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kejelasan Sasaran Anggaran	.718	1.392
Akuntabilitas Publik	.483	2.070
Sistem Pelaporan	.601	1.665

Sumber : Data Olahan, 2016.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*).

Gambar 2
Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2016

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas

maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139).

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.754 ^a	.568	.552	2.15912

Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,568. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 56,8 %, sedangkan sisanya sebesar 43,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Metode Analisis Data

Metode Regresi Linear berganda

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X₁, X₂, ... X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163).

Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Kinerja Manajerial
- X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran
- X₂ = Akuntabilitas Publik

- X₃ = Sistem Pelaporan
- A = Konstansa
- β_{1,2,3} = Koefisien Regresi
- e = Error

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

H₁ : Kejelasan Sasaran Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3.177 > 1,991$ dan $sig.t \ 0,002 < 0,05$ dengan demikian H₀ ditolak dan H₁ diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu (Putra, 2013) yang menunjukkan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran.

H₂ : Akuntabilitas Publik Berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,585 > 1,991$ dan $sig.t \ 0,001 < 0,05$ dengan demikian H₀ ditolak dan H₁ diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Ini mendukung penelitian dari (Putra, 2013) tentang akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

H₃ : Sistem Pelaporan Berpengaruh Terhadap Kinerja Manajerial

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2.547 > 1,991$ dan $sig.t < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan terhadap kinerja manajerial.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianti, dkk 2014) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan system pelaporan keuangan terhadap kinerja manajerial, maka pada bagian akhir dari penelitian ini penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Kabupaten Rokan Hulu, hal ini dikarenakan kejelasan sasaran anggaran kinerja suatu unit kerja organisasi dinilai baik secara finansial, memudahkan aparat untuk menyusun target-target anggaran, selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang akan dicapai oleh pemerintah daerah, aparat akan memiliki informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi untuk mencapai tujuan.

- 2) Pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel akuntabilitas publik berpengaruh terhadap terhadap kinerja manajerial di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dapat dilihat dari proses pertanggungjawaban penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah daerah berusaha dengan baik dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahannya.
- 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dikarenakan sistem pelaporan mampu memberikan informasi dan juga mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan dan mengukur aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga memberikan informasi keuangan yang jelas serta membantu aparatur pemerintahan memberikan keputusan dan menyusun perencanaan selanjutnya.

Keterbatasan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial di seluruh SKPD di Kabupaten Rokan Hulu yang meliputi: kejelasan sasaran anggaran,

akuntabilitas publik dan sistem pelaporan. Banyak variabel lain yang juga mungkin mempengaruhi kinerja manajerial yang belum diungkap dalam penelitian ini, seperti diantaranya partisipasi penyusunan anggaran, sistem sentralisasi/desentralisasi, peran internal audit, sistem pengendalian intern dan lain sebagainya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

1) Bagi Akademis

Diharapkan peneliti berikutnya dapat menambahkan variable independen maupun dependen seperti partisipasi penyusunan anggaran, sistem sentralisasi/desentralisasi, peran internal audit, sistem pengendalian intern dan lain sebagainya. Serta diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbesar cakupan sampel yang diambil.

2) Bagi pemerintah Daerah

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi mengenai kejelasan anggaran dimasa yang akan datang.
- b. Kepada setiap SKPD Kabupaten Rokan Hulu agar dapat transparan dalam penyusunan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan

DAFTAR PUSTAKA

Astini, Ni Kadek. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Manajemen

Terhadap Kinerja Manajerial Skpd di Kabupaten Klungkung. *e -Journal SI Akuntansi*. Universitas Pendidikan Ganesha

Bangun, Andrias. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel pemoderasi (studi kasus pada pemerintah Deli Serdang)*. Universitas Sumatra Utara

Herawaty, Netty. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*. Universitas Jambi

Hidayattullah, Afilu dan Irine Herdjiono. 2015. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Skpd Di Merauke*. Universitas Musamus Merauke

Kusuma, I Gede Eka Arya. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan pada Ketepatan Anggaran (Studi Empiris Di Skpd Pemerintah Provinsi Bali)*. Universitas Udayana Denpasar

Kusumaningrum, Indraswari. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem*

- Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.* Universitas Diponegoro
- Terhadap Kinerja Manajerial Pada Hotel Berbintang Di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Mardiasmo (2005). *Akuntansi Sektor Publik.* Penerbit Andi Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajat (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi.* Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis. Penerbit Erlangga.
- Nuryanti, Wika. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Skpd: Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar). *Skripsi.* Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Nurhalimah Dkk. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Di Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi.* Universitas Syiah Kuala
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang).* Universitas Negeri Padang.
- Prima, Hilarius. 2014. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Hotel Berbintang Di Daerah Istimewa Yogyakarta.* Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Sari, Desak Putu Intan Permata dkk. 2014 Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). *Journal.* Universitas Ganesha
- Selvi, Yuanna Try dkk. 2014. Pengaruh Partisipasi Dalam Penganggaran dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Ekonomi.* Universitas Riau
- Sekaran, Uma (2007). *Research Methods for Business.* Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba
- Setiawan, Eko dkk. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.* Univeraitas Riau
- Setyowati, Lilis dan Purwantoro. 2013. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dan Kepuasan Kerja Pada Pemerintah Kota Semarang. *Media Ekonomi &*

- Teknologi Informasi*.
Universitas Dian Nuswantoro
- Solina, Meria. 2014. Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kota Tanjungpinang. *Skripsi*. Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi*. Universitas Teknologi Yogyakarta
- Supriyatno. 2010. *Pengaruh Partisipasi Pejabat Struktural Dalam Penyusunan Anggaran, Komitmen Organisasi, Profesionalisme dan Struktur Organisasi Pada Kinerja Manajerial Pemerintah Kota Denpasar*. Universitas Udayana Denpasar
- Suwandi, Annisa Pratiwy. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Kota Padang)*. Universitas Negeri Padang
- Yulianti, Reni dkk. 2014. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan). *Jurnal Ekonomi*. Universitas Riau
- BPKP. 2011. *Tentang Sistem Pelaporan*
- Inpres Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Beadan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2000). *Tentang pelaporan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *tentang pengelolaan keuangan daerah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *tentang pemerintahan daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah*
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang keuangan negara*
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2001 *tentang perbendaharaan negara*
- Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 *tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*

Undang-undang Nomor. 25 tahun
2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan
nasional

Bpk.go.id

Riaupos.co